

BADAN KEAMANAN LAUT – KAJIAN HI – PENERAPAN – KONVENSI IMO – COAST GUARD		
2020		
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DI BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT TENTANG "PENERAPAN KONVENSI-KONVENSI IMO OLEH COAST GUARD"		
ABSTRAK	-	<i>International Maritime Organization (IMO)</i> adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam mengatur keamanan dan keselamatan di laut (<i>security and safety at sea</i>). IMO telah banyak membuat aturan internasional yang mengikat semua negara yang meratifikasinya karena aturan tersebut berupa <i>treaty</i> atau perjanjian internasional. IMO membuat perjanjian-perjanjian internasional yang pada umumnya dengan nomenclature <i>convention</i> atau konvensi yang terbagi dalam kategori <i>maritime safety, marine pollution, liability and compensation, other matters</i> . Indonesia sudah meratifikasi beberapa Konvensi IMO sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, yang diratifikasi oleh kementerian/lembaga yang terkait dengan tugas atau fungsinya dengan prosedur pengikatan diri (<i>consent to be bound by a treaty</i>). Konvensi-konvensi IMO tidak secara langsung meminta negara peserta untuk membentuk <i>coast guard</i> dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi IMO tersebut, tetapi diserahkan kepada kepentingan nasionalnya. <i>Coast guard</i> adalah kepentingan negara peserta dalam upaya mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional dan penegakan hukumnya, sehingga menjadi kewenangan penuh negara peserta menentukan siapa dan bagaimana <i>coast guard</i> tersebut. Terkait dengan hal ini, Bakamla mempunyai peran penting baik sebagai <i>coordinating agency</i> maupun <i>leading agency</i> dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut yang meliputi rejim-rejim maritim mulai perairan pedalaman (<i>internal waters</i>), perairan kepulauan (<i>archipelagic waters</i>), laut teritorial (<i>territorial sea</i>), zona tambahan (<i>contiguous zone</i>), zona ekonomi eksklusif (<i>economic exclusive zone</i>), landas kontinen (<i>continental shelf</i>), dan laut lepas (<i>high seas</i>).
	-	Dalam Kajian ini membahas tentang penerapan Konvensi-Konvensi IMO oleh negara pantai, khususnya oleh <i>Coast Guard</i> sebagai instansi penegak hukum di laut. Kajian ini menjabarkan aspek perjanjian internasional, konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan koordinasi dalam rangka penerapannya di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menyajikan praktek terbaik yang dilaksanakan oleh Philippine Coast Guard dalam menerapkan Konvensi-Konvensi IMO di negaranya.
CATATAN	:	- Kajian ini dibuat pada tahun 2020.
	-	Kajian ini merupakan program kerja Seksi Hukum Internasional, Direktorat Hukum Bakamla RI bekerja sama dengan Universitas Padjajaran.